

ABSTRAK

SYAHNOR RIFA'I, NPM: 2022501. Judul **“PENGELOLAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN (STUDI KASUS RUMAH DINAS GARUDA MAHARAM KABUPATEN BALANGAN)”**. Dibimbing oleh Bapak **Dr. Reno Affrian, S.Sos.,M.AP** sebagai pembimbing I, **Bapak Akhmad Berkatillah, S.Sos., M.A** sebagai pembimbing II

Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan mengatur proses pemungutan permasalahannya adalah Pengawasan yang dilakukan tidak efektif, Kesulitan dalam melakukan pembayaran atau kesadaran dalam pembayaran yang menurun dan Retribusi yang dilakukan belum mencapai target retribusi yang ditentukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Balangan (Studi Kasus Rumah Dinas Garuda Maharam Kabupaten Balangan) dan faktor penghambatnya.

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data diambil melalui penarikan secara *purposive sampling* berjumlah 13 orang dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif dan mengadakan membercheck.

Hasil dari penelitian Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Balangan (Studi Kasus Rumah Dinas Garuda Maharam Kabupaten Balangan) kurang optimal, hal ini dapat dilihat dari indikator: *Pertama*, sub variabel perencanaan indikator tujuan sudah baik yang mana pengelolaan retribusi adalah meningkatkan pendapatan asli daerah. Indikator penyusunan langkah-langkah sudah baik yang mana menentukan tujuan pengelolaan retribusi. Indikator keputusan sudah baik yang mana mengacu pada peraturan daerah. *Kedua*, sub variabel pengorganisasian indikator kemampuan petugas kurang baik yang mana prosedur tidak dijalankan. Indikator sumberdaya manusia kurang baik yang mana petugas belum memiliki pemahaman. *Ketiga*, sub variabel penggerakan indikator sesuai perencanaan kurang baik yang mana kesadaran pembayaran yang menurun. Indikator mencapai tujuan belum baik yang mana target tidak diikuti oleh langkah-langkah. *Keempat*, sub variabel pengawasan indikator efektif kurang baik yang mana proses pelaksanaannya tidak berjalan sesuai. Indikator efesien kurang baik yang mana proses yang dilakukan berulang-ulang. Faktor penghambat adalah ketidakjelasan tarif retribusi yang diterima, petugas yang belum memiliki pemahaman, aspek yang tidak dirumuskan secara jelas, pelaksanaan yang kurang jelas, pelaksanaan tidak berjalan sesuai mekanisme dan pengelolaan retribusi tidak mengikuti alur kerja yang jelas. Sedangkan faktor pendukung adalah meningkatkan pendapatan asli daerah (pad), terciptanya akuntabilitas dalam penggunaan rumah dinas dan pemeliharaan aset dijalankan dengan konsisten.

Disarankan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan agar dapat menginisiasi penyempurnaan regulasi turunan terkait mekanisme pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah. Kepala Bagian Umum agar perlu memperbarui dan mempertegas SOP pelaksanaan pengelolaan retribusi agar seluruh petugas memiliki panduan yang jelas. Pengguna Rumah Dinas agar dapat mengikuti prosedur penggunaan sesuai ketentuan.

ABSTRACT

SYAHNOR RIFA'I, NPM: 2022501. Title: **"MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS USE LEVIES IN BALANGAN REGENCY (CASE STUDY OF THE GARUDA MAHARAM OFFICIAL HOUSE, BALANGAN REGENCY)."** Supervised by **Dr. Reno Affrian, S.Sos., M.AP.** as Supervisor I, and Mr. **Akhmad Berkatillah, S.Sos., M.A.** as Supervisor II.

The Balangan Regency Regional Secretariat Office's collection process is plagued by ineffective supervision, difficulties in payment or decreased awareness, and levies not reaching the specified target. The purpose of this study is to determine the management of levies on the use of regional assets in Balangan Regency (Case Study of the Garuda Maharam Official Residence, Balangan Regency) and the inhibiting factors.

This research method employed a qualitative approach, using data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. Data sources were obtained through purposive sampling of 13 individuals. After data collection, analysis included data reduction, data presentation, and verification of conclusions. Data credibility testing included extended observation, increased diligence, triangulation, negative case analysis, and member checking.

The results of the study on the Management of Regional Asset Use Retribution in Balangan Regency (a case study of the Garuda Maharam Official Residence in Balangan Regency) were suboptimal. This can be seen from the following indicators: First, the planning sub-variable, the objective indicator, is good, indicating that retribution management is aimed at increasing regional revenue. The step-by-step indicator, which determines the purpose of retribution management, is good. The decision indicator, which refers to regional regulations, is good. Second, the organization sub-variable, the officer's ability indicator, is poor, indicating that procedures are not followed. The human resources indicator, which is poor, indicates that officers lack understanding. Third, the mobilization sub-variable, the planning indicator, is poor, indicating that payment awareness is declining. The goal-achieving indicator, which is poor, indicates that targets are not followed by steps. Fourth, the monitoring sub-variable, the effectiveness indicator, is poor, indicating that the implementation process is not running smoothly. Efficiency indicators are poor, with repetitive processes. Inhibiting factors include unclear retribution rates, officers lacking understanding, unclearly formulated aspects, unclear implementation, non-compliance with mechanisms, and lack of clear workflow for retribution management. Supporting factors include increased regional original revenue (PAD), accountability for the use of official residences, and consistent asset maintenance.

The Regional Secretary of Balangan Regency is advised to initiate improvements to derivative regulations related to the mechanism for managing retribution for the use of regional assets. The Head of the General Affairs Division is advised to update and clarify the SOP for retribution management to ensure all officers have clear guidance. Official residence users are advised to follow the established usage procedures.